

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Good Governance*

2.1.1.1 Pengertian Good Governance

Tata pemerintahan yang baik umumnya ditandai dengan penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai dasar utama. Prinsip-prinsip ini kini lebih dikenal sebagai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yang mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Dengan adanya paradigma pemerintahan yang baik di Indonesia, diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang efektif. Ketika pemerintahan yang baik telah terbangun, tindakan korupsi dan kolusi yang sering dilakukan oleh individu di sektor pemerintahan dapat dicegah, bahkan tindak pidana korupsi mungkin tidak akan terjadi lagi, karena inti dari prinsip *good governance* adalah menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Prinsip *good governance* menciptakan keseimbangan antara kinerja pemerintah sebagai pelayan publik dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Tata kelola pemerintahan yang baik mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan lainnya, dengan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama. Selain itu, tata pemerintahan yang baik melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan, mana suara dan pendapat masyarakat dijadikan pertimbangan. Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan juga menjadi hal yang

penting dan harus diketahui oleh masyarakat. Supremasi hukum dan penegakan hukum juga menjadi fokus utama dalam pengaturan pemerintahan

Menurut Kusmayadi et al., (2015) *Good Governance* adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang baik dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Good governance juga diartikan sebagai tata kelola pemerintah yang baik adalah isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintah. Meningkatnya semangat atau tuntutan untuk mewujudkan pemerintah yang baik terjadi seiring dengan gerakan reformasi dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. *Good governance* mengacu pada nilai atau prinsip yang sekaligus merupakan karakteristik yang dapat membedakan antara pola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan buruk Hamruna et al., (2022). Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan mereka. Untuk mewujudkan konsep pemerintahan yang baik, peran pemerintah tidak lagi bersifat dominan, melainkan fokus pada peningkatan kontribusi dari tiga pilar negara, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Peningkatan kontribusi dari pilar ketiga ini merupakan indikasi adanya perubahan dari masa

lalu, di mana negara telah gagal menciptakan ruang dialog yang memadai, sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi terhambat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip *good governance* dapat dianggap sebagai upaya untuk menerapkan asas-asas demokrasi yang mencerminkan penghormatan terhadap pelestarian hak-hak rakyat melalui penguasaan, penegakan nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. *Good Governance* juga dapat dilihat sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang baik.

Good Governance mencerminkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, yang perlu diterapkan untuk mencapai kesuksesan dalam suatu organisasi, sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Wijaya et al., 2018).

2.1.1.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Saat ini, prinsip tata pemerintahan yang baik telah menjadi bagian yang sangat penting dalam diskusi mengenai paradigma pembangunan, birokrasi dan pembangunan di masa depan. Hal ini disebabkan peran penerapan prinsip *good governance* adalah untuk menyediakan mekanisme dan pedoman yang dapat memberikan keseimbangan bagi semua pemangku kepentingan dalam memenuhi kepentingan masing-masing.

Inti dari pemahaman *good governance* terletak pada pengertian prinsip-prinsip yang mendasarinya. Selain itu, tercapainya penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bertanggung jawab bergantung pada pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi yang efektif. Elemen ketiga *good governance* ini saling terkait dan berinteraksi secara setara. Hubungan dan kemitraan semacam ini pada umumnya dapat berkembang dengan baik hanya setelah prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan secara efektif.

Jumlah komponen atau prinsip yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang baik bervariasi antara satu institusi dan institusi lainnya, serta antara para ahli yang berbeda. Namun terdapat beberapa prinsip yang umumnya dianggap sebagai prinsip utama dalam *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Menurut Hamruna et al., (2022), menjelaskan mengenai prinsip-prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Daya tanggap (*responsiveness*)
4. *Rule of Law*
5. Kompetensi dan Profesionalisme
6. Efektivitas dan Efisiensi
7. Partisipasi

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, baik pada proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran yang meliputi informasi mengenai tujuan, sasaran, sumber pendapatan pada setiap jenis belanja serta korelasi. Dengan adanya transparansi, diharapkan masyarakat bisa melakukan social control dan memberikan feed back.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan negara yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan secara terbuka kepada masyarakat serta memberikan informasi mengenai laporan keuangan kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan lainnya.

3. Daya tanggap (*Responsiveness*)

Wujud nyata dari prinsip daya tanggap dalam tata pemerintahan antara lain adalah penyediaan pusat pelayanan pengaduan/keluhan masyarakat, pusat pelayanan masyarakat dalam hal-hal yang bersifat kritis dan gawat, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website serta berbagai bentuk tanggapan pihak eksekutif dan legislatif dalam forum pertemuan publik. Tanpa diterapkannya prinsip daya tanggap, penyelenggaraan pemerintah akan berjalan lamban.

4. *Rule of Law*

Dalam pemberian layanan publik dan pelaksanaan pembangunan sering kali terjadi pelanggaran hukum, kejadian yang paling populer saat ini yaitu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk KKN serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan Lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum.

5. Kompetensi dan Profesionalisme

Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat. Wujud nyata dari prinsip ini dapat dilihat dari dilakukannya upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya yang ada, serta upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

6. Efektivitas dan efisiensi

Agar dapat meningkatkan kinerjanya, tata pemerintahan membutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan serta menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Dalam hal ini, harus ada upaya untuk selalu menilai tingkat keefektifan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya

yang tersedia. Jika tidak di terapkannya prinsip tersebut akan menyebabkan pemborosan keuangan dan sumber daya lainnya.

7. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintah. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggaraan pemerintah dapat lebih mengenal warganya. Dengan demikian, kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas.

Menurut Sedarmayanti (2012:5), menyatakan ada empat prinsip utama dalam melaksanakan *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)
2. Transparansi (Keterbukaan)
3. Partisipasi (Melibatkan Masyarakat)
4. Supermisi Hukum (Aturan Hukum)

Adapun penjelasan mengenai keempat prinsip *good governance* tersebut yaitu:

1. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak dan kebijakan yang ditetapkan

2. Transaparansi (Keterbukaan)

Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.

3. Partisipasi (Melibatkan Masyarakat)

Terbukanya bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan ataupun kritik terhadap pemerintah. Pemerintah yang baik akan menyediakan sarana publik untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintah.

4. Supermasi Hukum (Aturan Hukum)

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat bagi setiap kebijakan publik yang ditempuh.

2.1.1.3 Unsur – unsur *good governance*

Good governance bisa diartikan sebagai tata kelola yang baik, sesuai dengan prinsip keterbukaan dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan tujuan organisasi yang sesuai. *Good governance* sendiri hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh Lembaga yang melibatkan kepentingan publik.

Menurut Hamruna et al., (2022) terdapat beberapa unsur-unsur yang dapat membangun dan bersifat saling berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur yang ada dalam *good governance* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara atau Pemerintah
2. Sektor Swasta
3. Masyarakat

Beberapa unsur-unsur *good governance* diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Negara atau Pemerintah

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Negara dalam konsep *good governance* berperan untuk menciptakan kondisi politik ekonomi dan sosial yang stabil, dengan cara sebagai berikut:

- Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- Menyediakan public service yang efektif dan akuntabel
- Menegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Melindungi lingkungan hidup
- Mengurus standar pengelolaan keuangan dan standar keselamatan public

2. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta yang mencakup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi dalam sistem pasar, seperti industri pengelolaan perdagangan, perbankan dan koperasi masuk kegiatan sektor internal.

Adapun peran dalam konsep *good governance* sektor swasta yaitu sebagai berikut:

- Menjalankan industri
- Menciptakan lapangan kerja
- Menyediakan insentif bagi pegawai
- Meningkatkan standar hidup Masyarakat
- Memelihara lingkungan hidup
- Menaati peraturan
- Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Masyarakat

- Menyediakan kredit bagi pengembangan usaha kecil dan menengah

3. Masyarakat

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Lembaga ketiga tersebut merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Negara perlu menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik, termasuk perbaikan sistem politik, sistem pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik.

Dengan kondisi yang demikian, minat sektor swasta untuk berkembang akan meningkat. Jika sektor swasta tumbuh, maka masalah kemiskinan dapat teratasi melalui adanya investasi di negara ini.

2.1.1.4 Peran BPKAD dalam Mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah

Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(*good governance*). BPKAD bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran daerah, pengelolaan kas dan aset daerah, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Peran BPKAD dalam Mewujudkan *good governance* sebagaimana diuraikan dalam pedoman *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997), serta didukung oleh regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa peran penting, yaitu:

1. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKAD menyusun dan menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal, guna mendorong keterbukaan dalam pengelolaan keuangan.

2. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

Seluruh proses penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara sistematis dan dapat diaudit, sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

3. Efektivitas dan Efisiensi

BPKAD berperan dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

4. Kepatuhan terhadap Regulasi

Pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan legalitas dan keabsahan proses keuangan.

5. Penyusunan dan Penyajian LKPD

BPKAD bertugas menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada publik dan lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi, (2016) sistem pengendalian internal pemerintah didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) merupakan bagian yang tidak dapat dikecualikan dari sistem akuntansi pemerintahan. SPIP adalah suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan

organisasi serta seluruh karyawan, yang dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat insidental atau responsif terhadap kasus-kasus tertentu.

Menurut Nurul Lathifah (2021:2), sistem pengendalian internal pemerintah didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Arah, manajemen, dan individu lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang kemampuan terkait pencapaian tujuan yang berhubungan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat penulis disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang integral dan berkelanjutan, yang melibatkan pimpinan, manajemen, dan seluruh pegawai dalam suatu entitas. SPIP berfungsi untuk memberikan keyakinan yang mampu mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan operasional, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berperan dalam menjaga laporan keuangan dan pengamanan aset negara, tetapi juga dalam memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi secara keseluruhan.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Hamruna et al., (2022), tujuan dari pengendalian internal dijelaskan sebagai berikut:

1. Melindungi aset organisasi
2. memilih, mengumpulkan, dan meneliti data akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi, dan
4. Mendorongnya terhadap kebijakan manajemen.”

2.1.2.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berikut merupakan unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008) :

SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian;

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, diatur bahwa para pemimpin instansi pemerintah harus menciptakan dan mempertahankan pengendalian lingkungan yang dapat mendorong perilaku positif dan mendukung penerapan sistem pengendalian internal di tempat kerja mereka, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;

- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

2. Penilaian risiko;

Dalam upaya melakukan penilaian risiko, pemimpin pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian risiko ini terdiri dari:

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan;
- b. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan;
- c. Identifikasi risiko; d. Analisis risiko;
- d. Mengelola risiko selama perubahan

3. Kegiatan pengendalian;

Pemimpin pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta karakteristik, tugas, dan fungsi yang relevan. Kegiatan pengendalian yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

- a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja pemerintah;

- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian ;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya manusia dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi; dan

Pemimpin instansi pemerintah diwajibkan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menyampaikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi mengenai informasi tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk menjamin komunikasi yang efektif dan efisien seperti yang disebutkan dalam ayat (1), pemimpin instansi pemerintah setidaknya harus:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan saran komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan pengendalian intern.

Pemimpin instansi pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan observasi lebih lanjut.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

2.1.2.4 Peran Inspektorat dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Inspektorat merupakan aparat pengawasan internal pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dalam memastikan terciptanya pengendalian yang efektif atas seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan Inspektorat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menekankan pentingnya pengawasan intern dalam rangka mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan SPIP, Inspektorat daerah memiliki peran penting dalam beberapa aspek pengendalian internal berikut:

1. Melakukan Audit Internal

Inspektorat melaksanakan audit internal terhadap seluruh unit kerja perangkat daerah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi dan Reviu Program Kegiatan

Inspektorat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah serta melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan guna meningkatkan keandalan data dan informasi.

3. Pemantauan atas Tindak Lanjut Temuan

Inspektorat memantau dan memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil audit, baik dari internal maupun eksternal (misalnya BPK), ditindaklanjuti secara tepat waktu oleh OPD terkait.

4. Pemberian Konsultasi dan Pembinaan

Selain fungsi pengawasan, Inspektorat juga berperan dalam memberikan konsultasi, saran, dan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi.

5. Pencegahan Kecurangan dan Penyimpangan

Inspektorat berperan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan (fraud), serta pelanggaran hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Inspektorat berkontribusi secara langsung terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, kepatuhan hukum, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan daerah

adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Menurut Bahri, (2019:71) kualitas laporan keuangan merupakan tolok ukur keberhasilan proses akuntansi dalam menghasilkan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Mahmudi, (2016) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah informasi yang mendukung para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih baik. Terdapat lima indikator yang menentukan kualitas informasi dalam laporan keuangan, yaitu: relevansi, kejelasan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemudahan pemahaman.

Laporan keuangan daerah merupakan alat penting bagi berbagai pihak. Sehingga, harus disusun dengan baik agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, investor, dan Masyarakat. Informasi yang berkualitas akan membantu mereka dalam mengambil Keputusan salah satunya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenai tujuan laporan keuangan menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan psisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3.3 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, laporan keuangan juga memberikan berbagai manfaat dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan. Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024), laporan keuangan pemerintah pusat memiliki beberapa manfaat utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya laporan yang terstruktur dan dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah dapat menunjukkan akuntabilitasnya dalam penggunaan sumber daya publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara.

2. Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah. Data mengenai pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban negara digunakan dalam penyusunan kebijakan fiskal serta pengalokasian anggaran di berbagai sektor. Keputusan yang berbasis pada laporan keuangan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran negara.

3. Membantu Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi kinerja keuangan dalam satu periode tertentu. Evaluasi ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keuangan negara, serta merancang perbaikan kebijakan ke depan.

4. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah dapat mengelola keuangan negara dengan baik. Dengan adanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat memperoleh kepastian bahwa dana publik dikelola secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepercayaan publik yang meningkat dapat berdampak positif pada stabilitas ekonomi dan sosial negara.

5. Mendukung Perencanaan dan Pengendalian Anggaran

Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian anggaran di masa mendatang. Dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja terhadap anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan keuangan yang diimplementasikan telah berjalan sesuai rencana. Selain itu, informasi keuangan yang terdokumentasi dengan baik dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

2.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan

prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi Keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Aspek – aspek relevansi mencakup:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa depan berdasarkan hasil dari masa lalu dan kejadian saat ini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat memberikan manfaat kepada pengguna untuk pengambilan Keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap, yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan dengan memperhatikan tantangan yang ada.

Informasi diberikan secara jelas agar tidak terdapat kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan terbebas dari interpretasi yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan data secara factual, serta dapat diverifikasi. Karakteristik keandalan mencakup:

a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain lainnya yang seharusnya disajikan wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dapat diuji dan apabila pengujian tersebut dilakukan lebih dari sekali dan oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan Kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan untuk kebutuhan umum dan bukan untuk kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan yang

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3.5 Kendala Informasi Yang Relevan dan Andal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena kepraktisan. Berikut ini tiga hal yang menimbulkan kendala, yaitu:

a) Materialitas

Laporan keuangan pemerintah diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Dimana, informasi dianggap material apabila kelalaian atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memperngaruhi Keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

b) Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi manfaatnya lebih kecil. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Hal ini di perlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normative yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relative antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda – beda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan Tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan professional.

2.1.3.6 Unsur – unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berikut ini yang termasuk unsur – unsur dari laporan keuangan :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan berbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan – LRA , belanja , transfer , dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur – unsur nya adalah pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos – pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakupnya adalah penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Opersional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.4 Kajian Empiris

Sebagai referensi dan sumber yang relevan untuk penulisan usulan penelitian ini, penulis menggunakan bahan referensi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penggunaan perspektif dari penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan hasil, objek, dan subjek penelitian ini, sehingga dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

Menurut Kuntadi et al., (2022) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil artikel literature review yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel standar akuntansi pemerintah (x1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah variabel (y), adan pengaruh variabel sistem pengendalian internal pemerintah (x2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah variabel (y), dan ada pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia (x3) terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah (y)

Menurut Agustiningtyas et al., (2020) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Lokasi Penelitian pada OPD Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.

Shinta et al., (2020) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Standar Akuntansi Pemerintahan, dan *Good Governance* mempengaruhi variable Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan variable Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh variable Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Harun, (2021) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Lokasi Penelitian yaitu Kota Ternate. Hasil penelitian didapat bahwa pemahaman Standar Akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate, kemudian pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi juga berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate. Selain itu didapat bahwa sistem Pengendalian Internal secara parsial tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate. dan pemahaman Standar Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal secara serentak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate.

Herawati & Nopianti, (2017) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dan *Good Governance* secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan *Good Governance* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mokoginta et al., (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Sinaga & Hidayat, (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan, dan Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya bahwa dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal dan hasil audit laporan keuangan yang baik, serta penerapan good governance yang maksimal maka akan semakin menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Agus & Dedy, (2021) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, *Good Governance*, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi penelitian pada Kota Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kota Denpasar, good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kota Denpasar, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kota Denpasar. Bagi OPD Kota Denpasar agar meningkatkan dan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah, *Good Governance*, pemanfaatan teknologi informasi agar dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Rahman & Rahmawati, (2023) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Sumber

Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, lokasi penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dan system pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong. Demikian juga kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong. Implikasi penelitian ini dapat mengukur aspek-aspek apa saja yang menjadi prioritas penulis dalam mengungkapkan kualitas laporan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong.

Yuntina & Arifin, (2022) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sistem informasi akuntansi, *good governance*, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hida & Berliani, (2024) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Lokasi penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung. Hasil temuan menyajikan bahwa meskipun kualitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung dalam kondisi baik, tetapi terdapat keterlambatan dalam pelaporan. SAP dan SPIP memegang pengaruh yang

signifikan pada kualitas laporan keuangan, sementara *Good governance* tidak memegang pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, maka disarankan untuk melakukan pengembangan berkala pada implementasi SAP dan SPIP, secara bersamaan tetap memperhatikan aspek *Good governance* untuk peningkatan yang lebih holistic.

Hanifah & Haryanto, (2021) Melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi penelitian pada seluruh SKPD Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hamruna et al., (2022) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian dari pengujian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi

Sulawesi Tengah. Selanjutnya dari pengujian menunjukkan bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari pengujian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

Reswari & Nazir, (2022) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Public Governance*, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi penelitian pada Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), *Good Public Governance*(X2) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) berpengaruh positif pada kualitas laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Y). kesimpulannya Penerapan standar akuntansi pemerintah, *Good Public Governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada kementerian ketenagakerjaan.

Fitria, F. (2024) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah . Lokasi penelitian pada SKPD Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung, Sistem pengendalian

internal secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung, Good governance secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD Kota Bandung. Lalu Penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan good governance secara keseluruhan atau secara simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung.

Azri & Ruslim, (2023) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sistem pengendalian intern, audit internal, dan Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, secara simultan atau bersama-sama sistem pengendalian internal, audit internal, dan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kalsum et al., (2021) Melakukan penelitian dengan judul Sistem Pengendalian Internal dan *Good corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi penelitian pada PT. Hadji Kalla Toyota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan sedangkan good corporate governance berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan.

Afifah et al., (2018) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber

Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (3) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (4) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (5) Peran Pejabat Pengelola Keuangan-Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Maramis et al., (2018) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lokasi penelitian pada Pemerintah Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good governance memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak ada pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Zein et al., (2024) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada PEMDA Kab.Mojokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan (LKPD) Kabupaten Mojokerto. Variabel tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan. Secara determinasi diperoleh nilai R square atau koefisien determinasi sebesar 14,3% yang berarti variabel penerapan good governance dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mampu menjelaskan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 14,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Perbedaan hasil dari beberapa penelitian tersebut disebabkan oleh variasi dalam objek penelitian serta waktu pelaksanaan penelitian. Berikut adalah tabel yang menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cris Kuntadi, Juniarty Erika Magdalena Saragi, Syasi Ikhilami Syafira (2022)	Variable independent: Sistem Pengendalian Internal	Variable independent: standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumberdaya manusia	Hasil menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah (x1), sistem pengendalian internal pemerintah (x2), dan kompetensi sumber daya manusia (x3) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (y).	Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 3, Issue 5, Mei 2022, E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246, JIMT
	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian	Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Lokasi penelitian : Metode kualitatif		

	Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Alat Analisis: Regresi Linear Berganda			
2.	Vika Erinna Agustining Tyas, Irma Tyasari, Doni Wirshandono Yogivaria (2020) Pengaruh <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variable independent: Pengaruh <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Variabel dependen: Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Metode: Kuantitatif Alat Analisis : Regresi Linear Berganda	Variabel independent: Kompetensi Sumber Daya Manusia Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.	JRMA, Volume 8, No. 1, Tahun 2020, E-ISSN : 2715-7016, Universitas Kanjuruhan Malang
3.	Istiqomah Shinta Philadelphiah, Sri Suryaningsum, Sriyono (2020) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah,	Variable independent: Pengaruh <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Internal Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Variable independent: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan, dan <i>good governance</i> mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh variabel kualitas	J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2020 : 17-35 P-ISSN: 2721-5474, <u><i>Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe</i></u>

	<i>Good Governance</i> , dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Metode : Kuantitatif		laporan keuangan pemerintah daerah.	
4.	Muhammad Iqra Harun (2021) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variable independent: Sistem Pengendalian Internal Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Regresi Linear Berganda	Variable independent: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Lokasi Penelitian	Hasil penelitian didapat bahwa pemahaman Standar Akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate, kemudian pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate.	JSSH, Vo. 1 No. 2 , e-ISSN : 2777-015X., Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
5.	Tuti Herawati, Defi Nopianti (2017) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variable independent: Pengaruh <i>Good Governance</i> Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Metode : Kuantitatif	Variable independent: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Alat Analisis : Analisis Regresi Lokasi Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan <i>Good Governance</i> secara simultan mempunyai pengaruh yang signi	STAR – Study & Accounting Research Vol XIV, No. 2 – 2017, ISSN : 1693-4482, Universitas Teknologi Digital

	Pemerintah Daerah				
6.	Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh (2017)	Variable independent: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal	Variable independent: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 874-890, ISSN-P : 1907-9737, ISSN-E : 2686-4215
	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Metode : Kuantitatif		
		Alat Analisis: Analisis Linear Berganda			
7.	Mahfudzoh Sinaga, OK Sofyan Hidayat (2017)	Variable independent: Pengendalian Internal, <i>Good Governance</i>	Variable independent: Audit Laporan Keuangan, Lokasi Penelitian	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan <i>good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya bahwa dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal dan hasil audit laporan keuangan yang baik, serta penerapan <i>good governance</i> yang maksimal maka akan semakin menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.	Jurnal Mediasi (Manajemen, Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi), Vol 06. No 1 Juli 2017, ISSN-6342, Universitas Negeri Medan
	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan, dan Penerapan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Metode : Kuantitatif		
		Alat Analisis : Analisis Regresi Berganda			

8.	I Gede Agus Junyantara, I Putu Deddy Samtika Putra (2021)	Variable independent: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, <i>Good Governance</i>	Variable independent: Pemanfaatan Teknologi Informasi Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kota Denpasar, <i>good governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kota Denpasar, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kota Denpasar.	Hita Akuntansi dan Keuangan, juli 2021, e-ISSN 2798-8961, Universitas Hindu Indonesia
	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, <i>Good Governance</i> , dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Analisis Regresi Linear Berganda			
9.	Yudi Rahman , Risa Rahmawati, Fauziannor (2023)	Variable independent: Pengaruh <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Intern	Variable independent: Kualitas Sumber Daya Manusia Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governance</i> dan system pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian juga kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	JURNAL ILMIAH EKONOMI BISNIS, Jilid 9 Nomor 2 Juli 2023, ISSN ONLINE 2615-2134, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia
	Pengaruh <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Analisis Regresi Berganda			
10.	Sindy Shelika Yuntina, Atwal Arifin (2024)	Variable independent: <i>Good Governance</i>	Variable independent: Sistem Informasi Akuntansi	Hasil penelitian ini sistem informasi akuntansi, <i>good governance</i> , dan	<i>Economic and Digital Business Review</i> , Volume

	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	dan Sistem Pengendalian Internal Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Alat analisis: analisis regresi linear berganda	Lokasi Penelitian Metode Kualitatif	sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. :	5 Issue 2 (2024) Pages 859 – 871, ISSN : 2774-2563, Universitas Muhammadiyah Surakarta
11.	Rachma Hida Silfa Utami, Kartika Berliani (2024) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variable independent: <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Internal Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Metode: Kuantitatif Alat analisis: analisis regresi linear berganda	Variable independent: Standar Akuntansi Pemerintah	Hasil temuan menyajikan bahwa meskipun kualitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung dalam kondisi baik, tetapi terdapat keterlambatan dalam pelaporan. SAP dan SPIP memang pengaruh yang signifikan pada kualitas laporan keuangan, sementara <i>Good governance</i> tidak memegang pengaruh yang signifikan	Jurnal Maneksi, No. 2, Vol 13 Juni 2024, e- ISSN: 2597-4599, Univeristas Indonesia Membangun
12.	Amiroh Zumar Hanifah Haryanto (2021) Analisis Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Sistem Akuntansi Pemerintahan	Variable independent: <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Intern Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Variable independent: Sistem Akuntansi Pemerintahan Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>good governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas	<i>Diponogoro Journal Of Accounting</i> , No. 4, Vol 10 tahun 2021, ISSN (Online): 2337-3806, Universitas Diponegoro

	dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Metode : Kuantitatif		laporan keuangan.	
		Alat Analisis : Regresi Linear Berganda			
13.	Irmawati Hamruna, Zakir Muhammad, Rahman Thaher (2022) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variable independent: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Metode : Kuantitatif Alat Analisis : Analisis Regresi Berganda	Variable independent: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Lokasi Penelitian	Penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun juga terdapat temuan yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan SAP merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal menunjukkan hasil	Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 05, Nomor 10, Oktober 2022, ISSN 2623-2022, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu

yang bervariasi.					
14.	Yulinda Ayu Reswari, Nazmel Nazir (2022)	Variable independent: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Variable independent : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Publik Governance</i>	Penerapan standar akuntansi pemerintah, <i>Good Public Governance</i> dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	JURNAL SOSIAL DAN SAINS, No. 9 , Vol 2 , 2022, E-ISSN 2774-700X, Universitas Trisakti Jakarta
	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Publik Governance</i> dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kementerian Ketenagakerjaan	Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Lokasi Penelitian		
		Metode : kuantitatif			
		Alat Analisis : Analisis Regresi Linear Berganda			
15.	Fitria (2024)	Variable independent: Good Governance Dan Pengendalian Internal	Variabel independent : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan <i>good governance</i> secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah SKPD Kota Bnadung. Dan Penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan <i>good governance</i> secara keseleruhan atau secara simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kota Bandung.	Review of Accounting and Business, Vol 4 No 2, thn 2024, E-ISSN : 2774-5287
	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Lokasi Penelitian : SKPD Kota Bandung		
		Metode : Kuantitatif			
		Alat Analisis : Regresi Linear Berganda			

16.	Rizki Azri, Herman Ruslim (2023)	Variable independent: Pengendalian Internal	Variable independent: Audit Internal, dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sistem pengendalian intern, audit internal, dan <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, secara simultan atau bersama-sama sistem pengendalian internal, audit internal, dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, No 6, Vol 14, 2023, e-ISSN: 2809-8862, Universitas Tarumanagara Jakarta
	Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Lokasi Penelitian		
		Metode: Kuantitatif			
		Alat Analisis : Analisis Regresi Linear Berganda			
17.	Ummu Kalsum, Mursalin, Sulastrri, Edy Susanto (2021)	Variable independent: Sistem Pengendalian Internal	Variable independent: <i>Good Corporate Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan sedangkan <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan.	<i>Journal of Management</i> , Volume 4 Issue 2 (2021) Pages 128 – 137, ISSN : 2614-851X, Universitas Muslim Indonesia
	Sistem Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan PT. Hadji Kalla Toyota	Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Lokasi Penelitian		
		Metode: Kuantitatif			
		Alat Analisis : Analisis Regresi Linear Berganda			
18.	Siti Afifah, Fadli, Baihaqi (2018)	Variable independent: Sistem Pengendalian Internal	Variable independent: Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan	.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,	Jurnal Fairness Volume 8, Nomor 2, 2018, ISSN 2303-0348, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi,	Variable dependen: Kualitas			

	Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Peran Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Alat Analisis : Analisis Regresi Linear Berganda Metode : Kuantitatif	Peran Pengelolaan Keuangan Lokasi Penelitian	Penerapan Sistem Pengendalian Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,	
19.	Miranda Miryam Maramis, Jenny Morasa, Heince R.N Wokas (2018) Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variable independent: <i>Good Governance</i> Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda Metode : kuantitatif	Variable independent: Sistem Akuntansi Keuangan Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>good governance</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak ada pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	Jurnal Riset Akuntansi, 13(3), 2018, 563-570, Universitas Sam Ratulangi
20.	Fakhrizal Akhmad Zein, Titiek Rachmawati, Nekky Rahmiyati (2024) Pengaruh <i>Good Governance</i> dan	Variable independent: Pengaruh <i>Good Governance</i> Variable dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Variable independent: Standar Akuntansi Pemerintahan Lokasi Penelitian	Hasil penelitian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan. Variabel tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh	Journal of Economic, Business and Accounting, No 5, Vol 7, 2024, e-ISSN : 2597-5234, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Metode : Kuantitatif	negatif dan signifikan. Sementara itu, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan
	Alat Analisis : Analisis Regresi Linear Berganda	
Nisrina Maharani (2025) 213403024 Pengaruh <i>Good Governance</i>, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota. (Survei pada BPKAD dan Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2025)		

2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan yang berkualitas sangat penting bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan karena mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Bagi pemerintah daerah, laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, seperti perencanaan anggaran, pengalokasian dana, dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas juga menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga mampu mengurangi risiko kesalahan pencatatan, penyalahgunaan anggaran, maupun praktik korupsi.

Dalam konteks tersebut, *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menjadi dua faktor penting yang saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. *Good governance* menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi dalam setiap proses pengelolaan keuangan, sedangkan SPIP bertindak sebagai sistem

pengawasan dan pengendalian yang menjamin keandalan proses pencatatan serta pelaporan keuangan pemerintah.

Dalam penelitian ini, terdapat teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu teori *agency*. Teori Agensi (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemerintah (agen) dan Masyarakat (principal). (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal sebagai penyedia dana akan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen dan untuk menjalankan perusahaan. Prinsipal berharap agen akan menghasilkan pengembalian dari dana yang mereka tanamkan. Di sisi lain, agen wajib mengelola perusahaan didasarkan pada keinginan prinsipal.

Good governance kaitannya dengan *agency theory* adalah *Good governance* berperan sebagai sistem yang memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan keinginan rakyat dan mengelola sumber daya publik secara efisien, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*agent*) serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kaitannya dengan *agency theory* adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai alat pengawasan yang memastikan pemerintah (*agent*) menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan masyarakat (*principal*) SPIP membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan data keuangan yang akurat dan terpercaya, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memantau kinerja pemerintah.

SPIP tidak hanya berperan dalam mencegah penyimpangan, tetapi juga melindungi dana publik dari penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi. Selain itu, SPIP memastikan bahwa pemerintah mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan. Lebih dari sekadar sistem pengawasan, SPIP juga berfungsi sebagai jembatan yang menyelaraskan kepentingan pemerintah dan masyarakat, mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya SPIP, akuntabilitas pemerintah semakin meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik semakin kuat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat terwujud.

Good governance berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi asimetri informasi dan menyelaraskan kepentingan keduanya, melalui prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga berperan sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan agen bertindak sesuai ketentuan. Laporan keuangan pemerintah kota menjadi bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal, dan kualitasnya mencerminkan akuntabilitas serta transparansi. Dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, peran pemerintah sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Sebagai organisasi sektor publik terbesar, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Idawati & Eleonora, 2022). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan salah satunya yaitu *good governance*. *Good Governance* mencerminkan tata kelola

pemerintahan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, yang perlu diterapkan untuk mencapai kesuksesan dalam suatu organisasi, sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Wijaya et al., 2018)

Indikator-indikator tata kelola pemerintahan yang baik yang perlu dicapai oleh pemerintah daerah antara lain adalah transparansi, akuntabilitas, responsivitas, *rule of law*, kompetensi dan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi, dan partisipasi. Tata kelola yang baik adalah aset utama bagi suatu instansi atau organisasi. Perannya sangat penting dalam mengelola organisasi tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya dapat diukur melalui kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Prinsip-prinsip *good governance* digunakan untuk mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, sehingga menciptakan keseimbangan dalam kinerja pemerintahan sebagai penyedia layanan publik. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, yang pada gilirannya akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo, 2018).

Hubungan antara *good governance* dan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan dari penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Ketika pemerintah menerapkan *good governance*, masyarakat akan lebih percaya terhadap laporan keuangan yang disajikan, karena mereka merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Di sisi lain, sistem pengendalian internal yang efektif akan

meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, penerapan *good governance* juga mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prinsip transparansi. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam *good governance* memastikan bahwa setiap transaksi dan pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional dan bebas dari keterlibatan pihak tertentu yang tidak semestinya.

Ketika pemerintahan menerapkan *good governance* dengan baik, setiap penggunaan anggaran akan lebih terkontrol dan terdokumentasi dengan jelas. Hal ini mengurangi risiko kecurangan, korupsi, serta kesalahan pencatatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan pemerintah yang sebenarnya tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah atau negara (Ningsih et.al, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Maramis et al., (2018), Herawati & Nopianti, (2017), Agus & Dedy, (2021), Shinta et al., (2020), K. Rahman, (2021) mengungkapkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Hanifah & Haryanto, (2021), Zein et al., (2024) mengungkapkan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Adapun faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang terkoordinasi untuk melindungi aset organisasi, memilih, mengumpulkan, dan menganalisis data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong penerapan kebijakan manajemen.

Good governance menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi mendorong terciptanya budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap aturan. Hal ini memudahkan penerapan prosedur dan kebijakan pengendalian internal yang ketat. Di sisi lain, sistem pengendalian internal yang kuat mendukung terwujudnya *good governance*. Sistem pengendalian internal yang efektif membantu mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi et al., (2022), Agustiningtyas et al., (2020), Mokoginta et al., (2017), Sinaga & Hidayat, (2017), Agus & Dedy,

(2021) mengungkapkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan daerah merupakan alat penting bagi berbagai pihak. Sehingga, harus disusun dengan baik agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, investor, dan Masyarakat. Informasi yang berkualitas akan membantu mereka dalam mengambil Keputusan salah satunya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan , andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Good Governance dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki hubungan yang erat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. *Good Governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas,

efisiensi, serta partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakses informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi keuangan pemerintah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, akuntabilitas yang baik mendorong pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalkan potensi manipulasi data atau penyalahgunaan anggaran.

Di sisi lain, SPI berperan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian yang memastikan bahwa proses pencatatan, pelaporan, serta penggunaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien. SPI yang kuat terdiri dari beberapa elemen penting, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, risiko terjadinya kesalahan pencatatan, kecurangan, atau bahkan korupsi dalam pengelolaan keuangan dapat dikurangi. Selain itu, SPI juga memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga kualitas laporan keuangan semakin meningkat.

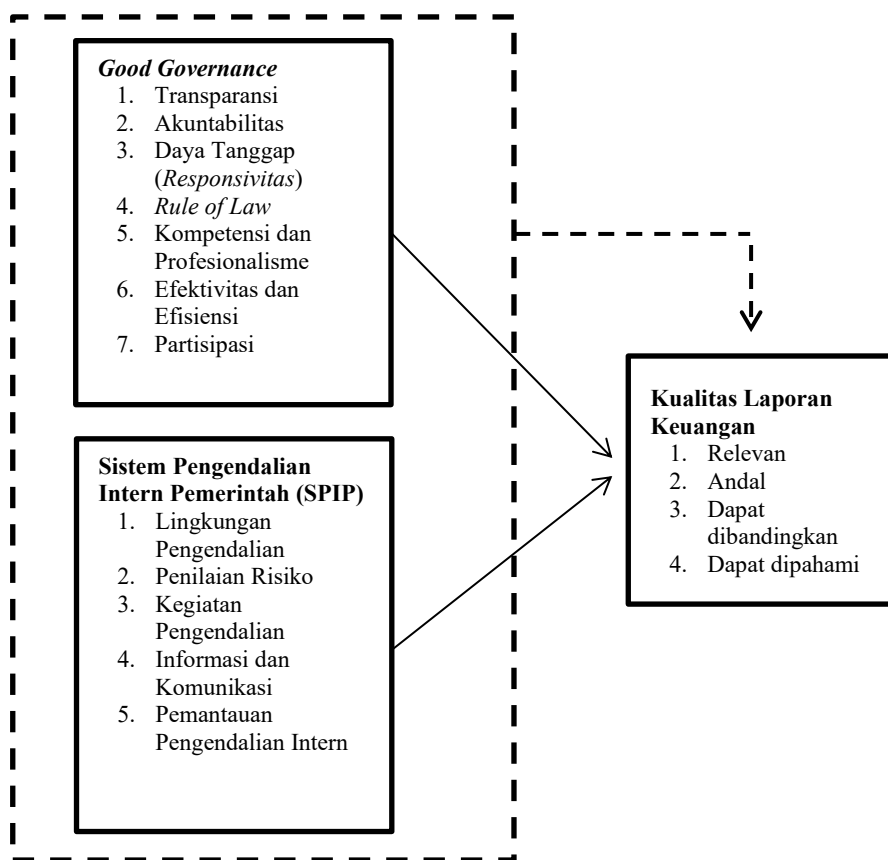
Hubungan antara *Good Governance* dan SPI dapat dilihat dari bagaimana keduanya saling melengkapi dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik. *Good Governance* menciptakan lingkungan pemerintahan yang terbuka dan

bertanggung jawab, sedangkan SPI menyediakan mekanisme kontrol yang memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan yang dibuat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dengan adanya kombinasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dan sistem pengendalian internal yang efektif, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah akan lebih akurat, transparan, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, auditor, masyarakat, serta lembaga pengawas keuangan.

Secara keseluruhan, penerapan *Good Governance* dan SPI yang efektif akan menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, meningkatkan kredibilitas di mata publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat penerapan *Good Governance* dan meningkatkan efektivitas SPI harus terus dilakukan agar kualitas laporan keuangan pemerintah semakin baik dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Terdapat dua variabel independen yang akan dianalisis, yaitu *good governance* dan sistem pengendalian internal, serta satu variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah. Tata kelola yang baik diharapkan dapat

meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dan responsivitas yang akan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sementara itu, sistem pengendalian internal berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan dengan efisien dan efektif, serta meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan.



Keterangan:

- : Secara parsial
 ----- : Secara simultan

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian, biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan hasil – hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁: *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya.

H₂: *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya.